

Wednesday, 02 March 2016

## **BPMPD akan Evaluasi Penyerapan Dana Desa**

**Ambon** - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maluku akan segera melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Desa (DD) yang telah disalurkan sampai pada tahap tiga.

Kepala BPMPD Maluku, Rusdin Ambon menjelaskan, DD murni dari APBN, namun kewenangan untuk evaluasi dan pengawasan berada pada kabupaten/kota bahkan provinsi. “Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui maksimal tidaknya pelaksanaan program yang dirancang untuk dilakukan dengan menggunakan DD tersebut, evaluasi itu dari kami BPMPD provinsi,” tandas Ambon, kepada wartawan disela-sela Rakor BPMPD se-Maluku di Amans Hotel, Selasa (1/3).

Dijelaskan, tujuan evaluasi dan pengawasan dari BPMPD tetap dilakukan, untuk mengetahui seberapa besar manfaat DD yang digunakan untuk program-program pembangunan dengan tujuan utama untuk pemberdayaan masyarakat.

Bahkan saat ini di Maluku mulai dari penyaluran DD tahap I sampai pada tahap III ini seluruhnya sudah 90% tersalurkan. Untuk Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur maupun Kepulauan Aru, penyaluran DD belumlah maksimal dikarenakan pada ketiga kabupaten ini baru saja menyelesaikan pilkada.

“DD tiga kabupaten ini masih ada di kas daerah masing-masing. Kemarin mereka masih disibukan dengan pilkada, tapi mengingat sudah selesai maka dipastikan dapat tersalurkan tuntas pada tahun ini,” tuturnya. Dengan demikian tambah dia, dipastikan dalam tahun ini, tidak ada tunggakan penyaluran DD lagi. **(S-43)**

Friday, 04 March 2016

## **Dana Desa Harus Dikelola Aparatur Yang Profesional Desa**

**Ambon** - Bantuan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke Kota Ambon di tahun ini mencapai Rp 21 miliar lebih. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dikucurkan hanya mencapai Rp. 9,6 miliar. Angka ini cukup fantastik sehingga pemkot minta kepada aparatur desa/negeri yang mengelolanya harus benar-benar profesional sehingga tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy ketika membuka bimtek 'Peningkatan Kapasitas Aparatur' bagi pimpinan BPD dan saniri negeri lengkap sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri yang berlangsung di Pacific Hotel, Kamis (3/3) mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 kini negeri/desa tidak hanya sebagai fokus pembangunan tetapi menjadi perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. "Desa/negeri juga tidak lagi menjadi subyek sasaran pembangunan tetapi menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan," ujarnya.

Menurutnya, dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, dokumentasi perencanaan desa harus dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dengan solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di satu desa.

Untuk mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan hingga saat ini perlu adanya penyiapan aparatur pemerintah desa untuk mengelola semua anggaran yang disalurkan bagi puluhan desa/negeri yang ada di Ambon.

"Dengan kewenangan yang diberikan ini untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa maka pemerintah harus menata desa negeri yang ada di Ambon demi mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Keberadaan Badan Musyawarah Desa (BMD) dan saniri negeri lengkap merupakan bagian atau unsur yang penting karena secara langsung mengetahui kedudukan dan fungsi di masyarakat sehingga diharapkan mampu melaksanakan pengawasan di desa.

"BPD dan saniri harus mampu jalankan tugas mereka secara optimal sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan belanja desa," tandasnya. **(S-39)**

Saturday, 12 March 2016

## **Tunggakan PBB P2 Kota Ambon Capai Rp. 17,691 M**

**Ambon** - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) untuk Kota Ambon tahun 2013-2015 mencapai Rp 17,691 Miliar. Sayangnya, meski tunggakan itu mencapai belasan milyar, tetapi hal itu tidak tergambar sama sekali dalam postur APBD Pemkot Ambon.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pajak Pratama Cabang Ambon, La Sikamba kepada Komisi II DPRD Kota Ambon Jumat (11/3). Sikamba mengatakan, tunggakan ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk DPRD, apalagi dalam pembahasan APBD, sama sekali tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan PBB P2.

“Kita fokuskan dulu persoalan terkait dengan PBB P2 Kota Ambon yang masih meninggalkan pertanyaan. Ada pengakuan secara akuntabel bahwa Kota Ambon masih punya tunggakan PBB sebesar 17 milyar lebih, tetapi catatan itu samasekali tidak tergambar pada postur APBD Kota Ambon tahun 2013-2015. Ini sangat aneh sekali,” ungkap Sikamba.

Dijelaskan, awal mulanya peristiwa tunggakan PBB P2 itu tahun 2013, dimana ada masyarakat yang lancar bayar PBB P2. Dikatakan, temuan kasus seperti ini dikategorikan masih bisa ditagih, kemudian ada yang kurang lancar, diragukan dan tak lancar sama sekali.

Menurutnya, totalnya yang disetor wajib pajak mulai tahun 2013-2015 itu sebenarnya Rp. 38,630 milyar. Namun terjadi kemacetan dalam penyetoran atau kategori masih bisa ditagih kurang lebih Rp 13 milyar. Kategori diragukan Rp 10 milyar, kurang lancar Rp 13 milyar dan tak lancar hampir Rp 4 milyar.

Sedangkan untuk pengisian piutang PBB P2 Kota Ambon, yang lancar tinggal Rp 41 juta, kurang lancar Rp 1 milyar lebih, diragukan Rp. 5 milyar dan yang macet itu Rp. 15 milyar maka jumlah total pengisian tinggal Rp 20 milyar.

Sikamba merincikan, piutang PBB P2 yang paling tertinggi berada di Kecamatan Sirimau yakni Rp 7. 945 milyar, kecamatan Nusaniwe Rp 3,698 milyar, Kecamatan Baguala Rp 5,792 milyar, Kecamatan Leitimur Selatan Rp 2,549 milyar.

Menyikapi hal ini, dalam waktu dekat DPRD Kota Ambon akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Ambon, Yopi Selano.

“Kita akan melakukan pemanggilan kepada dinas pendapatan karena memang ini harus bertanggung jawab soal tunggakan itu. Komisi II akan tetap lakukan pencarian data karena dispenda belum terlalu respon dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw. Laturiuw heran dengan tunggakan Rp 17 milyar lebih yang ternyata tidak tergambar didalam pembahasan APBD.

**(S-40)**

Thursday, 17 March 2016

## Kejar Opini WTP, Pemkot Benahi Sistim Pengelolaan Aset

**Ambon** - Untuk mengejar penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka Pemkot Ambon mulai serius membenahi sistim pengelolaan aset daerah.

Walikota Ambon Richard Louhenapesy mengaku, sejauh ini, pengelolaan aset memang menjadi perhatian penting pemkot, karena banyak aset yang tidak ditata, sehingga pada tahun kemarin, pemkot n hanya mendapatkan penilaian WDP.

“Masalah keuangan merupakan masalah serius dan Idealnya kita bisa dapatkan opini yang WTP, maka aset menjadi perhatian seruis untuk dibenahi dan di tahun lalu Pemkot Ambon telah membentuk sebuah SKPD baru dengan nama pengelolaan aset daerah itu menjadi bukti keseriusan kita,” tandas ungkap walikota kepada wartawan usai membuka Bimtek Review Laporan Keuangan Berbasis Aktual yang berlangsung di Pacific Hotel, Rabu (16/3).

Selain itu, pihak BPKP juga terus memberikan pelatihan untuk menyusun dan mempersiapkan seluruh aparatur Inspektorat bagaimana cara menyusun laporan keuangan secara aktual termasuk kepada aparatur pemkot.

Review laporan keuangan merupakan metode baru dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan namun diharapkan memberikan nilai tambah buat aparatur Inspektorat. Kegiatan ini penting, karena dalam upaya memberikan pengertian mengenai pengawasan internal pemerintah di lingkup Inspektorat kabupaten/kota, meningkatkan kompetensi melakukan review keuangan dan memberikan keyakinan informasi akurasi, keadaan keabsahan informasi laporan keuangan, sehingga menghasilkan keuangan yang berkualitas.

“Saya rasa ini penting sehingga sumber informasi tentang pelaporan keuangan bisa keluar dari satu sumber yakni Inspektorat, karena penggunaan basis aktual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern yang telah diterapkan di negara yang lebih dulu melakukan reformasi manajemen publik,” ujarnya.

Pemkot, kata walikota, berkeinginan agar pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan harus berjalan transparan dan akuntabel. Sukses tidaknya pelaksanaan ini adalah pembenahan sistem akuntabilitas sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Review keuangan merupakan salah satu proses menelaa laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya, sehingga dapat hasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri,” tukasnya.

Ditambahkan. dengan tekad membenahi pengelolaan aset, maka di tahun ini diharapkan Pemkot Ambon bisa mendapatkan penilaian WTP dari BPKP. (S-39)

Monday, 21 March 2016

## DPRD Ambon Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

**Ambon** - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan April mendatang tidak hanya ditolak sejumlah daerah di Indonesia, tapi DPRD Kota Ambon juga terang-terangan menolak rencana tersebut. DPRD Kota Ambon bahkan meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan iuran BPJS kesehatan, sebab itu akan memberatkan masyarakat.

“Sekarang ini dengan kesadaran masyarakat semua rame-rame berupaya untuk membayar iuran BPJS kesehatan guna menjadi peserta mandiri, sehingga minat masyarakat perlu didorong bukan karena masyarakat bertambah banyak, justru tarif dinaikan. Ini salah kaprah. Masyarakat kecil nantinya akan merasa dibohongi oleh pemerintah dan pastinya mereka akan keluar dari keanggotaan BPJS,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Asmin Matdoan kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Sabtu (19/3).

Dikatakan, seharusnya pemerintah bersyukur, masyarakat sudah mulai mengikuti program ini. Jadi seperti iuran itu tidak perlu dinaikan, kalau masih saja tarif dinaikan, otomatis masyarakat akan keluar menjadi peserta.

“Ini adalah program pemerintah, jadi pemerintah harus senang dan bangga, bukan malah lihat orang banyak masuk dalam BPJS kesehatan terus menaikkan iurannya. Itu sama saja membebankan masyarakat,” ujar Matdoan.

Diungkapkan, rencana kenaikan juga terlalu tinggi, untuk kelas I yang sebelumnya Rp. 59.500,- naik menjadi Rp. 80.000 atau lebih dari 30 persen. Kelas II dari Rp. 42.500, menjadi Rp. 50.000 dan kelas III yang sebelumnya Rp. 25.500 akan menjadi Rp. 30.000, kenaikan ini tidak tepat dan jelas tidak berpihak kepada masyarakat. “Yang jelas kami tetap menolak atas rencana kenaikan iuran BPJS tersebut sebab kenaikannya terlalu besar,” tukasnya.

Matdoan menambahkan, saat ini Pemkot Ambon sudah melakukan kerja sama dengan BPJS kesehatan untuk setiap perusahaan tenaga kerja harus memiliki BPJS kesehatan, bagaimana dengan iuran besar seperti itu maka semua peserta pada perusahaan kecil akan berhenti menjadi peserta. **(S-40)**

